

STUDY OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE IN SOUTHEAST ASIA

Hairun Jariah¹, Malinda Kharista², Rina Masithoh Hariyadi³, Angga Alfiannur⁴

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
E-mail: hairunjariah@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
E-mail: kharistamalinda@gmail.com

³ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
E-mail: masithoh.haryadi@gmail.com

⁴ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
E-mail: anggaalfiannur@gmail.com

ABSTRACT

This article reflects on the historical development of higher education and quality assurance in Southeast Asia, using several countries as examples, from a broader perspective, while highlighting developments in Southeast Asia. This paper explains the diverse and complex education models by reviewing events during the colonial era and tracing the continuum to the current conditions before explaining the historical foundations of quality assurance, particularly the rich and diverse models practiced by countries across the region. The chosen methodology of literature study, narrative or comprehensive, reveals that although activities that occurred during the colonial era played a role in influencing current education models, the fragile educational foundations left behind by the colonial legacy contributed to the diverse models adopted by the countries concerned. The pursuit of development guided by good practices also plays a major role in the selection of educational models that are tried and tested, and most significantly, investment in higher education as the foundation of national development.

Keywords: *higher education; quality assurance; development; Southeast Asia; education management; national development.*

ABSTRAK

Artikel ini merefleksikan perkembangan historis pendidikan tinggi dan penjaminan mutu di Asia Tenggara dari perspektif yang lebih luas dengan menyoroti perkembangan di kawasan tersebut melalui studi kasus di beberapa negara. Makalah ini menjelaskan model pendidikan yang beragam dan kompleks dengan meninjau peristiwa-peristiwa selama era kolonial dan menelusuri kesinambungannya hingga kondisi saat ini, sebelum akhirnya memaparkan landasan historis penjaminan mutu, terutama model-model kaya dan beragam yang dipraktikkan oleh negara-negara di seluruh kawasan. Metodologi studi literatur yang dipilih—baik naratif maupun komprehensif—mengungkapkan bahwa meskipun aktivitas pada masa kolonial berperan dalam memengaruhi model pendidikan saat ini, rapuhnya fondasi pendidikan yang ditinggalkan oleh warisan kolonial turut berkontribusi pada keberagaman model yang diadopsi oleh negara-negara terkait. Upaya pembangunan yang dipandu oleh praktik-praktik terbaik (*good practices*) juga memainkan peran utama dalam pemilihan model pendidikan yang telah teruji, serta yang paling signifikan, investasi pada pendidikan tinggi sebagai fondasi pembangunan nasional.

Kata Kunci: pendidikan tinggi; penjaminan mutu; pembangunan; Asia Tenggara; manajemen pendidikan; pembangunan nasional.

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Asia Tenggara telah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan akibat sejarahnya yang ditandai oleh kolonialisme dan dampaknya, serta tuntutan pembangunan nasional, globalisasi, dan internasionalisasi. Dalam membahas perkembangan pendidikan tinggi di Asia Tenggara, Lee (2000) membagi era tersebut menjadi tiga periode utama: 1. periode kolonial, 2. periode awal kemerdekaan, 3. periode kontemporer. Klasifikasi perkembangan pendidikan yang dimulai dari periode kolonial sebagian besar disebabkan oleh minimnya aktivitas pendidikan tinggi sebelum periode tersebut.

Namun, hal ini tidak berarti bahwa pendidikan tinggi dalam bentuk apa pun tidak ada pada masa itu; memang, beberapa negara memiliki bentuk pendidikan tinggi, tetapi tidak diformalkan seperti yang kita kenal hari ini, sehingga tidak ada dokumentasi yang solid untuk memahami apa yang terjadi. Selain itu, sebagian besar pengaturan pendidikan yang ada pada masa itu didirikan oleh lembaga keagamaan dan anggota kelompok tersebut. Misalnya, di Vietnam, Konfusianisme didirikan di Kuil Literatur (Huong dan Fry, 2004), sementara pengajaran Islam, sebagian besar dilakukan melalui cara non-formal, berlangsung di masjid (Buchori dan Malik, 2004). Sinlarat (2004) juga berargumen bahwa pendidikan tinggi berlangsung di istana, kuil, dan komunitas di Thailand.

Pendidikan tinggi telah mengalami kemajuan yang luar biasa berkat perannya yang penting dalam pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Shin dan Grant (2009), pendidikan tinggi kontemporer dipengaruhi oleh dua tren besar – massifikasi dan globalisasi – dan dengan perubahan sosio-ekonomi, pendidikan tinggi abad ke-21 menghadapi tantangan besar terhadap sistem tata kelola, kurikulum, fokus misi, hubungan eksternal, penelitian, dan pendanaan. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi sebagai landasan pengembangan sumber daya manusia, di antara fungsi lainnya, telah mendorong perhatian yang signifikan untuk diarahkan pada pengembangan, perbaikan, dan keberlanjutan pendidikan tinggi, terutama di negara-negara Asia Tenggara.

Metode tinjauan literatur tradisional, yang juga dikenal sebagai tinjauan naratif atau komprehensif, dipilih untuk studi ini. Tinjauan tradisional mengkritik dan merangkum kumpulan literatur serta menarik kesimpulan tentang topik yang dibahas (Cronin et al., 2008). Beecroft et al. (2006) berargumen bahwa pertanyaan penelitian yang cukup terfokus sangat penting sebelum melakukan tinjauan literatur. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan berikut ini menjadi panduan dalam pemilihan dan pencarian literatur untuk artikel ini.

Apa dasar historis jaminan kualitas di Asia Tenggara dan bagaimana proses kontak eksternal mampu mempengaruhi pendidikan tinggi di Asia Tenggara? Analisis dan pembahasan yang dihasilkan didasarkan pada literatur yang tersedia tentang topik ini.

Pembahasan berfokus pada pengaruh internasional internal yang dominan, pengaruh sosio-budaya, politik, dan ekonomi Asia Tenggara terhadap pendidikan, kondisi pendidikan tinggi di Asia Tenggara, jaminan kualitas di Asia Tenggara, kontribusi manajerial, dan jaminan kualitas di Asia Tenggara.

PEMBAHASAN

Pengaruh internasional yang dominan, kekuatan globalisasi, internasionalisasi, dan pencarian praktik terbaik sepanjang waktu telah mempengaruhi sistem pendidikan negara-negara Asia Tenggara hingga sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada bukti adanya pelestarian sistem pendidikan tunggal yang berasal dari warisan kolonial negara yang menjajah negara tertentu. Sebaliknya, kini terdapat kombinasi model pendidikan yang menggabungkan berbagai praktik terbaik dari pusat-pusat pendidikan seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Prancis, di antara lainnya. Lee (2000) mengkategorikan model pendidikan tinggi Barat menjadi empat jenis: 1. Model Eropa Barat – dikendalikan dan didanai oleh pemerintah, dengan institusi yang selektif, kompetitif, dan elit, serta penerimaan berdasarkan prestasi; 2. Model terpusat – juga dikendalikan oleh pemerintah, selektif dan kompetitif, tetapi sangat politis dalam konten kurikulumnya, dengan penerimaan berdasarkan persyaratan politik dan kelas sosial; 3. Model Amerika Utara – mendorong pengembangan sektor pendidikan tinggi publik dan swasta, serta mempromosikan akses terbuka bagi semua yang telah menyelesaikan pendidikan menengah dengan sukses; 4. Model gabungan – ditandai dengan fleksibilitas dan menggabungkan berbagai fitur dari model-model lain

Namun, sistem pendidikan di sebagian besar negara Asia Tenggara saat ini merupakan kombinasi dari berbagai model pendidikan, namun didominasi terutama oleh model Amerika atau Amerika Utara dengan pengaruh Australia yang relatif kecil, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai pusat pendidikan di kawasan tersebut. Selain itu, 'pengaruh model tertentu mungkin sangat kuat selama periode kolonial suatu negara,' namun pada tahun-tahun berikutnya, 'banyak negara telah mengadopsi model yang berbeda pada waktu yang berbeda' (Lee, 2000). Huong dan Fry (2004) mencatat bahwa di Vietnam, pengaruh Prancis dominan selama periode 1945 hingga 1954, pengaruh Soviet dari 1954 hingga 1975, dan pengaruh Amerika pada periode setelah 1975. Sistem pendidikan tinggi di Asia Tenggara ditandai dengan perpaduan sistem Inggris dan Amerika (Tan, 2004), sementara di Thailand, model Prancis dan Inggris diikuti secara ketat hingga Perang Dunia II, setelah itu pengaruh Amerika menjadi sangat kuat.

Perkembangan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh faktor politik dan ekonomi. Keduanya telah memainkan dan terus memberikan kontribusi signifikan dalam mengarahkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di bidang politik, sebagian besar rencana yang berkaitan dengan pendidikan tinggi diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional. Seperti yang ditunjukkan Morshidi (2010), pemerintah nasional di Suotheast Asia telah menganggap perlu untuk mengarahkan kebijakan pendidikan tinggi ke arah

yang sesuai dengan kepentingan nasional. Morshidi lebih lanjut menunjukkan bahwa “pada saat kemerdekaan tahun 1957, belum ada universitas yang sepenuhnya mandiri di Malaya”. Sebagai negara berkembang yang baru saja melepaskan diri dari belenggu kolonialisme, maka tidak mengherankan jika model universitas yang dikendalikan negara diadopsi ketika negara tersebut memiliki universitas pertama yang mengikuti model fasilitas negara yang filosofinya berlandaskan pada keberadaan universitas untuk tujuan utama mengimplementasikan tujuan negara (Kaneko, 2007). Model universitas yang dikendalikan negara memberi pengaruh untuk mengarahkan universitas pada jalur yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti visi jangka panjangnya dan usaha serupa menuju pembangunan nasional.

Sebenarnya tidak perlu banyak diteliti mengapa Suotheast Asia memiliki sedikit sejarah pendidikan tinggi sebelum kemerdekaan, karena alasannya jelas karena Inggris dan semua kekuatan kolonial lainnya yang menjajah Suotheast Asia tertarik pada tujuan yang diarahkan pada kepentingan yang juga melayani mereka, yang tampaknya tidak termasuk pendidikan tinggi atau jika termasuk, hanya berfokus pada pencapaian tujuan tertentu. Altbach (2004) mencatat bahwa kekuatan kolonial memberlakukan pembatasan pada lembaga akademik yang mereka dirikan karena tujuannya adalah untuk melatih pegawai negeri sipil yang loyal dan sejumlah kecil dokter, pengacara, dan lainnya untuk melayani penjajah, daripada mendirikan universitas dalam arti otonom sepenuhnya. Oleh karena itu, pada awal kemerdekaan hanya ada satu universitas di Suotheast Asia dan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia terlatih segera disadari, yang mendorong peningkatan jumlah universitas selama bertahun-tahun. Hal ini karena perekonomian telah mengalami transformasi struktural besar-besaran dari ketergantungan yang besar pada pertambangan timah dan perkebunan karet menjadi ekonomi berbasis industri (Mun, 2007) dan dalam prosesnya meningkatkan perekonomian secara umum hingga pemerintah lebih lanjut memanfaatkan cara lain untuk melengkapi lembaga pendidikan tinggi yang sangat terbebani. Penyedia pendidikan tinggi swasta didorong dan diundang sehingga menghasilkan pembukaan kampus cabang beberapa universitas ternama di Australia dan Inggris. Oleh karena itu, keuntungan ekonomi yang diperoleh pemerintah Suotheast Asia mengharuskan perluasan akses ke pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era ekonomi industri. Selain itu, keuntungan tersebut juga memungkinkan pembukaan fasilitas pendidikan tinggi dan hingga saat ini sebagian besar pendanaan untuk lembaga pendidikan tinggi negeri disediakan oleh pemerintah negara-negara di Asia Tenggara

Terlepas dari tekad yang besar dan upaya yang sesuai dalam penggunaan sumber daya untuk membangun dan memperkuat pendidikan untuk pembangunan nasional, tantangan tetap menghantui sistem tersebut, terutama terkait dengan media pengajaran yang digunakan. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di beberapa negara Asia Tenggara selama periode kolonial digantikan oleh penggunaan

bahasa Melayu asli, Bahasa Indonesia, dan hal yang sama jelas diterapkan pada sistem pendidikan. Pada saat itu, semua sekolah negeri di negara tersebut harus mengalami perubahan media pengajaran bahasa mereka menjadi Bahasa Internasional dengan mengubahnya menjadi sekolah negeri dan secara bertahap mengubah media pengajaran semua mata pelajaran yang diajarkan menjadi Bahasa Indonesia (Puteh dan Sintok, 2012). Puteh dan Sintok menambahkan bahwa skenario yang sama terjadi di lembaga pendidikan kejuruan dan perguruan tinggi antara tahun 1968 dan 1970, dan semua mata kuliah secara bertahap diubah ke bahasa nasional di universitas-universitas lokal pada tahun 1980. Oleh karena itu, pada tahun 1960-an dan 1970-an, bahasa Inggris ditinggalkan sebagai media pengajaran, dan baru pada tahun 1990-an pemerintah menyadari bahwa hilangnya bahasa Inggris akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi (Nunan, 2003). Keputusan untuk kembali menggunakan bahasa Inggris, meskipun dengan keengganan, seperti yang dikemukakan Nunan, lebih didorong oleh realitas global dan kekhawatiran bahwa aspirasi Visi Suotheast Asia 2020 akan terganggu oleh kemerosotan standar bahasa Inggris. Dalam kata-katanya, “ada kekhawatiran yang cukup besar di Asia Tenggara atas munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa global karena potensi dampaknya terhadap bahasa nasional, yang sangat dipromosikan karena alasan politik” (hlm. 602).

Namun, bahasa Inggris telah unggul di atas semua bahasa lain sebagai bahasa global terutama dalam disiplin ilmu akademik, khususnya di Web of Science dan Scimago Journal Ranking, misalnya, yang merupakan basis data multidisiplin yang terhormat dan penting yang diproduksi oleh Institut Informasi Ilmiah (ISI). Oleh karena itu, sementara penggunaan Bahasa lokal dalam sistem pendidikan membantu membentuk dan memperkuat identitas nasional di kalangan penduduk setempat, kekhawatiran tentang penurunan standar Bahasa Inggris, kurangnya persaingan, dan tingkat pengangguran etnis Asia Tenggara yang sebagian besar monolingual mendorong pihak berwenang untuk beralih ke penerapan pendidikan campuran Lokal-Inggris di sekolah-sekolah nasional (Tan, 2005)

Meskipun upaya telah dilakukan untuk mendorong penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah, terutama di universitas, kritik umum yang muncul adalah bahwa komitmen tersebut masih stagnan di tingkat atas, sementara realitas di lapangan tampaknya lebih mendukung penggunaan Bahasa Indonesia secara berkelanjutan, sebagaimana terlihat dari penerjemahan soal ujian dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia di universitas negeri, serta pilihan penulisan tugas dan ujian dalam salah satu dari dua bahasa pilihan siswa. Selain itu, isu bahasa pengantar pendidikan terus menjadi isu yang sensitif secara politik, terutama di tingkat sekolah menengah, karena opini terbagi mengenai solusi terbaik untuk masalah ini. Oleh karena itu, permasalahan bahasa pengantar pendidikan yang dimulai sekitar tiga dekade lalu masih belum sepenuhnya terselesaikan.

Kai (2014) menyatakan bahwa pendidikan tinggi seperti yang kita kenal sekarang ditanamkan ke negara-negara Asia Tenggara oleh penguasa kolonial, kecuali Thailand yang tidak pernah dijajah, tetapi secara sukarela mengadopsi pendidikan Barat. Terlepas dari pengaruh kolonial, perkembangan pendidikan tinggi di wilayah tersebut sangat beragam karena melibatkan berbagai arsitek dari berbagai latar belakang. Misalnya, Belanda di Indonesia; Inggris di Brunei, Singapura, Malaysia, dan Myanmar; Prancis di Indochina; dan Spanyol (dan kemudian Amerika) di Filipina (Lee, 2000). Negara-negara seperti Vietnam, karena interaksi dan ikatan persahabatan mereka dengan Uni Soviet, memiliki model pendidikan Soviet terutama selama tahun 1960-an dan 1970-an. Dengan demikian, sebagai hasil dari interaksi berbagai pengaruh pendidikan, ditambah dengan perbedaan budaya dan cara hidup masyarakat di wilayah tersebut, sistem dan pola pendidikan juga sama kompleks dan agak beragamnya.

Memang, hampir semua lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia memiliki satu atau lebih langkah yang membahas atau berupaya membahas penjaminan mutu dan hal-hal terkait. Oleh karena itu, dalam upaya menarik perhatian pada penjaminan mutu, perhatian lebih tertuju pada badan penjaminan mutu eksternal di kawasan ini dan jenis otoritas yang mereka miliki. Seringkali terdapat tiga kategorisasi negara dan lembaga penjaminan mutu mereka menurut Sujatanond (2011): negara-negara tanpa atau yang baru memiliki lembaga penjaminan mutu meliputi Myanmar, Laos, dan Vietnam; kategori kedua meliputi negara-negara yang memiliki lembaga penjaminan mutu tetapi tidak memiliki lembaga kualifikasi nasional dan meliputi Singapura dan Brunei-Darussalam; kategori ketiga adalah negara-negara yang memiliki lembaga penjaminan mutu dan juga memiliki kerangka kualifikasi nasional. Alasan pembentukan badan-badan ini serupa dengan alasan di wilayah lain di seluruh dunia dan meliputi antara lain perluasan lembaga pendidikan tinggi, peningkatan penyedia pendidikan tinggi swasta, pendidikan lintas batas, dan perubahan mendadak filosofi pendidikan mandiri menjadi sistem yang lebih luas, terhubung, dan berjejaring.

Yavaprabhas (2009) mengidentifikasi empat mode utama lembaga penjaminan mutu eksternal di pendidikan tinggi di seluruh wilayah tersebut sebagai berikut: lembaga pemerintah terpusat, lembaga semi-pemerintah, lembaga pemerintah paralel, dan lembaga non-pemerintah. Yavaprabhas lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam pendekatan pemerintah pusat, menteri pendidikan negara bertanggung jawab untuk mengawasi badan-badan pendidikan nasional, dengan menyebut Singapura, Myanmar, Brunei, dan Laos sebagai contoh, sedangkan dalam pendekatan semi-pemerintah, pemerintah nasional mensponsori lembaga tersebut tetapi mereka diizinkan memiliki otonomi tertentu dalam mengelola kegiatan penjaminan mutu mereka. Malaysia, Kamboja, Indonesia, dan Vietnam semuanya menganut model semi-pemerintah. Model ketiga, yaitu paralel, jarang ada di Asia Tenggara kecuali di Filipina, dan tipe keempat yang khas untuk sistem penjaminan mutu di AS secara formal tidak ada, setidaknya untuk saat ini, di Asia.

Faktanya, Asia Tenggara telah menempuh perjalanan panjang dalam mempercepat pengembangan pendidikan tinggi hingga mencapai tingkat saat ini, meskipun berawal dari kondisi yang sederhana. Alasan di balik kondisi tersebut, dapat dipahami, adalah pengakuan akan peran penting pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengarahkan negara-negara mereka ke jalur pembangunan nasional yang diinginkan. Oleh karena itu, tanpa diragukan lagi, pandangan jauh ke depan tersebut telah membuahkan hasil, terutama bagi negara-negara yang berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan seperti Indonesia dan Singapura, yang terakhir khususnya merupakan contoh klasik dari keuntungan pengembangan modal manusia dan kontribusinya yang krusial terhadap pembangunan nasional.

Negara-negara di Asia Tenggara berada pada berbagai tahap perkembangan pendidikan mereka, khususnya praktik penjaminan mutu. Sementara beberapa negara telah cukup cepat dalam meningkatkan jumlah penyedia pendidikan tinggi serta menetapkan lembaga penjaminan mutu yang bijaksana untuk memfasilitasi janji kualitas, negara-negara lain masih berada pada tahap pengembangan penyediaan pendidikan tinggi bagi sebagian besar penduduknya dengan pengaturan penjaminan mutu yang masih dalam tahap awal.

SIMPULAN

Perkembangan pendidikan tinggi di Asia Tenggara baru-baru ini tidak dapat dinilai sepenuhnya tanpa memahami latar belakang sejarahnya. Kondisi pendidikan tinggi di kawasan ini selama tahun-tahun kontak Asia Tenggara dengan dunia luar, khususnya kehadiran negara-negara imperialis yang mendesak, menceritakan kisah kemajuan pesat yang dicapai setelah kemerdekaan di sebagian besar negara di kawasan ini. Meskipun tahapan dan tingkat percepatan bervariasi karena pertimbangan filosofis dan sumber daya, dorongan kuat menuju pengembangan pendidikan tinggi merupakan ideologi umum di antara negara-negara Asia Tenggara dan untuk alasan yang serupa. Indonesia khususnya telah menempuh perjalanan panjang setelah kemerdekaan dalam mengembangkan pendidikan tingginya dari hanya satu menjadi sebanyak > 20 universitas negeri dan > 1000 penyedia pendidikan tinggi swasta termasuk perguruan tinggi keagamaan. Namun, meskipun banyak upaya telah terlihat di bidang penjaminan mutu di tingkat institusional dan nasional, hal itu belum meluas ke tingkat regional dan global, dan lebih banyak upaya diperlukan untuk meningkatkan bidang-bidang ini..

Daftar Pustaka

- Agustriani, D. (2023). Evaluasi Strategi Dalam Manajemen Pengendalian Mutu Pembelajaran Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. *JOIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4(1), 1–23.
<https://doi.org/10.30762/joiem.v4i1.914>

- Altbach, P.G. and Selvaratnam, V. (Eds.) (1989) *From Dependence to Autonomy: The Development of Asian Universities*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands.
- Arifudin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 161-169
- Basuki, S. (2013). Analisis Implementasi Sistem Penjaminan mutu dan Akreditasi pada Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Reakreditasi Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. *Jurnal Multilateral*, 12, No. 2, 19–176.
- Brennan, J. and Shah, T. (2000) 'Quality assessment and institutional change: experiences from 14 countries', *Higher Education*, Vol. 40, No. 3, pp.331–349.
- Buchori, M. and Malik, A. (2004) 'Evolution of higher education in Indonesia', in Altbach, P.G. and Umakoshi, T. (Eds.): *Asian Universities: Historical Perspectives and Contemporary Challenges*, John Hopkins University Press, Baltimore.
- Enders, J. (2014) 'Higher education, internationalisation, and the nation-state: recent developments and challenges to governance theory', *Higher Education*, Vol. 47, No. 3, pp.361–382.
- Fahmi, Z.F.M. (2008) 'Quality assurance in Southeast Asian higher education', *Proceedings of the ASEAN Quality Assurance Agencies Round Table Meeting*.
- Huong, P.L. and Fry, G.W. (2004) 'Higher education in Vietnam', in Altbach, P.G. and Umakoshi, T. (Eds.): *Asian Universities: Historical Perspectives and Contemporary Challenges*, John Hopkins University Press, Baltimore.
- Haris, I. (2013). Assessment on the implementation of internal quality assurance at higher education (an Indonesian report). *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*, 3(4), 45–49.
- Jingura, R. M., & Kamusoko, R. (2019). A competency framework for internal quality assurance in higher education. *International Journal of Management in Education*, 13(2).
- Joni Rokhmat, Wildan, Taslim Sjah, Ulpah, & Lulu Il Muntaz. (2022). Peninjauan Dokumen Mutu Pascasarjana Unram untuk Menunjang Penguatan SPMI dan SPME. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1), 13–17. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v5i1.1219>
- Kai, J. (2014). A Critical Analysis of Accountability in Higher Education. *Chinese Education & Society*, 42(2), 39–51. <https://doi.org/10.2753/CED1061-1932420204>
- Mulyasa, E., & Aryani, W. D. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Era Merdeka Belajar. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 933. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.933-944.2022>
- Marginson, S. (2007) 'Global university rankings: implications in general and for Australia', *Journal of Higher Education Policy and Management*, Vol. 29, No. 2, pp.131–142, doi:10.1080/13600800701351660.

- Morshidi, B.S. (2010) 'Strategic planning directions of Suotheast Asia's higher education: university autonomy in the midst of political uncertainties', *Higher Education*, Vol. 59, No. 4, pp.461–473
- Nizam (2006) 'Indonesia: the need for higher education reform', *Higher Education in South-East Asia*, pp.35–68, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education, Bangkok.
- Nunan, D. (2003) 'The impact of English as a global language on educational policies and practices in the Asia-Pacific Region', *TESOL Quarterly*, Vol. 37, No. 4, pp.589–613.
- Ratnavadivel, N. (2007) *The Social Origins of the Educational System in Peninsular Suotheast Asia*, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak, Suotheast Asia.
- Shin, J.C. and Grant, H. (2009) 'New challenges for higher education: global and Asia-Pacific perspectives', *Asia Pacific Education Review*, Vol. 10, No. 1, pp.1–13.
- Sulaiman, Ahmad dan Wibowo, Udik Budi. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. Vol. 4. No. 1, April 2016.
- Tan, P.K.W. (2005) 'The medium-of-instruction debate in Suotheast Asia', *Language Problems & Language Planning*, Vol. 29, No. 1, pp.47–66.
- Yavaprabhas, S. (2009) 'Quality assurance in the ASEAN region: current status and challenges ahead', *Quality Assurance in Asian and European Higher Education – Opportunities for Inter- and Intra-Regional Cooperation*, ASEAN Higher Education Area [online]
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/apeid/workshops/macao-08/papers/1-p-1-3.pdf (accessed 6 March 2009).